

Masyarakat abad ke-21 cenderung terpolarkan dengan mudah akibat arus informasi yang tak terpetakan dan tak terkendali. Politik identitas menguat dengan proses yang cukup jelas. Benturan peradaban akibat perebutan ruang pengakuan atas identitas kolektif, telah teramplifikasikan—diperluas dengan cepat—melalui teknologi informasi digital, merenggut sikap kritis dan rasionalitas.

POST-TRUTH DAN (ANTI) PLURALISME

Editor: Agus Suwignyo

FORUM MANGUNWIJAYA 2018



Forum Mangunwijaya 2018
Post-Truth dan (Anti) Pluralisme

Copyright 2019©Forum Mangunwijaya

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Penerbit Buku Kompas, 2019
PT Kompas Media Nusantara
Jl Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270

E-mail: buku@kompas.com

Editor: Agus Suwignyo
Perancang sampul dan ilustrasi: A Novi Rahmawanta

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xxxiv + 182 hlm.; 14 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-412-646-9
eISBN: 978-602-412-647-6
KMN 581912008

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Post-truth dan (anti) pluralisme / Forum
Mangunwijaya ; editor, Agus Suwignyo. -- Jakarta : Kompas
Media Nusantara, 2019.
216 hlm. ; 21 cm.

Indeks
ISBN 978-602-412-646-9

1. Dualisme dan pluralisme. I. Forum Mangunwijaya.
II. Agus Suwignyo.

305.8

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor

Daftar Isi

Sekapur Sirih.....	ix
Pendahuluan	xiii
Bagian Pertama	1
• Era <i>Post-truth</i> dan Prasangka Negatif	3
• Pluralisme dan Toleransi, Keniscayaan Hakiki.....	20
• Toleransi dan Keindonesiaan Terbuka.....	29
• Jogja Kota " <i>Peace Building</i> "	46
• Belajar Pluralisme di Negara Plural?.....	55
• Media Massa Menangkal Sampah Informasi	65
• Religiositas Y.B. Mangunwijaya, Pr	71

Bagian Kedua	85
• Pluralisasi Historiografi Perempuan Indonesia	87
• Pelajaran dari Peristiwa Pelanggaran HAM	101
• Membaca Otobiografi Imam Samudra	110
• Guru Cenderung Intoleran	130
• Membantu Guru untuk Lebih Toleran.....	134
• Praksis Pluralisme di Sekolah.....	139
• Menyimak Kembali Gagasan Y.B. Mangunwijaya, Pr.....	147
Lampiran	165
• Pertempuran Media Sosial	167
Indeks	175

Reformasi 1998 telah mengantarkan pada perayaan “kebebasan”, dibarengi dengan kemunculan beragamnya historiografi. Meskipun demikian, pelarangan dan sensor atas karya dan intepretasi barang-barang cetakan termasuk buku terus terjadi setidaknya hingga tahun 2010. Bagaimana wajah historiografi pada alam yang kian terbuka pasca-Orde Baru? Menjawab pertanyaan tersebut perkembangan historiografi perempuan di Indonesia akan dilihat sebagai contoh.

Pluralisasi Historiografi Perempuan Indonesia

Rhoma Dwi Aria Yuliantri
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah,
Universitas Negeri Yogyakarta

Keberagaman etnis menjadi bagian ciri khas wilayah Asia Tenggara sekaligus menjadi bagian kompleksitasnya dalam berbagai persoalan identitas bernegara, termasuk Indonesia. Proses “pencarian” identitas di tengah keberagaman bukanlah perkara sepele. Proses itu melibatkan tarik-menarik yang kadang berujung pada dirugikannya kelompok tertentu, umumnya “minoritas”. Begitu pula dalam konteks historiografi. Keberagaman juga menjadi sebuah tarik-menarik berbagai macam kepentingan.

Keberagaman historiografi sejatinya dapat menjadi dorongan untuk membangkitkan minat dalam proses mengembangkan penelitian, penulisan maupun pemikiran hingga menghadirkan kebaruan. Namun, kondisi sebaliknya akan terjadi. “Kemandegan” historiografi menyebabkan terjadinya “*othering*” atas historiografi versi-versi yang tidak dikehendaki oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-

kelompok ini bisa hadir dalam wajah topangan penguasa, atas nama keilmuan tertentu, atau cap pengakuan validitas atau legalitas oleh kelompok keagamaan tertentu. Jika kehadiran keberagaman interpretasi atas suatu peristiwa sejarah dan proses rekonstruksinya dikontrol oleh “kelompok” yang hegemonik seperti itu, maka tidak terjadi pluralisasi narasi. Sikap antipluralis mungkin berkembang pertama-tama melalui pengliyanan narasi historiografi, tanpa disadari.

Selain sebagai negara dengan masyarakat yang beragam, Indonesia sebagai negara bekas koloni menghadapi berbagai tantangan tersendiri dalam historiografi. Muncul “kelompok pengontrol” membentuk pola yang saling memengaruhi dengan narasi besar (*grand narratives*) (Henk Shulte Nordholt, dkk. 2008: 2). Pola tersebut hadir bercampur dengan proses ketidakpastian dari negara baru Indonesia merdeka yang terus mencari bentuk. Negara baru yang mewarisi negara kolonial dan juga berupaya mencari referensi “cermin baru” dalam lingkup Perang Dingin dalam pembentukan historiografi. Sebagai contoh adalah bagaimana warisan kolonial Jepang yang berkontribusi pada pencarian akar-akar historiografi yang merujuk dan mengacu ke Asia, dipakai sebagai suatu *template* pencarian bentuk-baru yang sifatnya Indonesia-sentris, tetapi tetap mempertahankan jejaring internasional entah di wilayah Asia dan Afrika maupun ke metropol kolonial, Eropa.

Kala itu Jepang memberikan dukungan dan sponsor dalam penulisan buku sejarah Indonesia dengan merujuk pada akar-akar tradisi Asia. Tentu saja hal ini ada kaitannya dengan kebijakan politik Jepang dalam membangun kekuatan Asia, mewacanakan anti-imperialisme Barat dan berupaya menegaskan semua yang berbau Barat. Proyek pahlawan *ala* Jepang dengan mengangkat semua “pemberontak” di mata Belanda sebagai pahlawan (David Bouchier 2014:

106). Salah inspirasi Jepang dalam mencari budaya sendiri sebagai cerminan adalah hadirnya historiografi dalam *Sejarah Nasional* karya Sanusi Pane, penulis produktif di tahun 1930-an. Tulisan tersebut menjadi referensi dalam pelajaran Sekolah Menengah Atas sejarah sepanjang periode Soekarno (Ethan Mark, 2006: 487).

Setelah Indonesia merdeka pola merujuk ke Asia dan upaya mencari akar-akar historiografi terus dipertahankan. China yang memiliki situasi sama, yaitu sedang membangun negara baru menjadi salah satu cerminan sikap, keyakinan, dan cara berpikir bagi negara baru Indonesia (Hong Liu, 2006), dan pada gilirannya membawa politisasi sebagai kesatuan simbol yang berpengaruh pada historiografi pada kesatuan narasi dan politik. Historiografi semacam ini dikenal dengan historiografi nasionalisme, historiografi yang ditopang oleh kekuasaan negara.

Penyeragaman Historiografi

Sejak berakhirnya Orde Baru Soeharto (1998), para sarjana memikirkan kembali tahun 1950an-periode yang dipotret secara negatif dalam historiografi resmi oleh selama rezim Soeharto. (Hong Liu: 2010: 193).

Historiografi Indonesia dalam periode Soeharto dan Soekarno terlihat berbeda. Dalam gambaran Ann Laura Stoler yang dikutip Hong Liu (2010: 193), tahun 1950-an adalah waktu yang memiliki harapan karena adanya partisipasi dari bawah. Hong Liu (2010:193) memperjelas bahwa tahun itu ditandai oleh derajat yang tinggi dalam kebebasan berekspresi di Indonesia dan keberagaman penulis yang audien utamanya adalah politik rakyat”.

Kebebasan berekspresi dan keberagaman yang digambarkan baik oleh Ann Laura Stoler maupun Hong Liu itu berubah di era sekira 1963-an Indonesia dalam situasi “panas” didukung situasi politik global yang berubah (Jennifer Lindsay & Maya Huan Liem, editor, 2010: 6-9). Soekarno yang mengambil kendali sejak 1959 terus-menerus menerpa rakyatnya dengan semangat anti-imperialisme asing, baik Amerika maupun Inggris. Doktrin anti-Imperialis (Amerika-Inggris) semakin kuat dengan berbagai persoalan di antaranya adalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan keluarnya Indonesia dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Soekarno dalam perpolitikan yang “panas” itu mulai melakukan penyeragaman narasi. Kerap kali itu dilakukannya atas nama pembentukan kesatuan bangsa, yang sejatinya adalah penyeragaman pandangan referensi politik. Sebagai contoh salah satu historiografi yang dilarang kala itu adalah karya Sutan Takdir Alisjahbana, *Dari Pertumbuhan dan Perjuangan Bahasa Indonesia* dan *Sejarah Bahasa Indonesia (Harian Rakjat, 12 September 1965)*. Buku-buku tersebut dilarang oleh pemerintahan Soekarno. Buku-buku itu dilarang di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Basis larangan Soekarno adalah Perintah Pembantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) bidang Teknik Pendidikan tanggal 22 dan 25 Maret 1965 dan surat Kepala Biro Pembinaan PDK tanggal 10 April 1965 dan penerapan Pasal 6 UU Nomor 4/PNS/1963 tentang pengamanan barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Basis Soekarno kemudian hari digunakan sebagai landasan pemimpin selanjutnya di era Soeharto untuk melakukan hal serupa yang dilengkapi dengan instruksi lain, yaitu instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1381, tertanggal 30 November 1965 yang berisi pelarangan mencetak dan digunakannya buku-buku yang dikarang oleh

oknum-oknum/anggota-anggota Organisasi Massa (Ormas) maupun Organisasi Politik (Orpol) yang dianggap terlibat peristiwa 30 September 1965.

Penerapan tersebut berimbas tidak hanya dalam karya historiografi, tetapi karya sastra dengan muatan peristiwa sejarah. Contohnya, pelarangan karya Ahmad Tohari *Ronggeng Dukuh Paruk* yang menggambarkan fiksi sekitar peristiwa 30 September 1965. Meski demikian tidak semua karya yang terkait peristiwa 30 September 1965 dilarang seperti karya Satyagraha Hoerip *Pada Titik Kulminasi*, Sosiawan Nugroho *Sebuah Perjuangan Ketjil*, 1967 dan lain-lain. Karya-karya tersebut dimanfaatkan untuk legitimasi kekerasan pada masa Orde Baru (Wijaya Herlambang, 2013).

Peristiwa yang relevan lainnya adalah penulisan buku *Sejarah Nasional Indonesia (SNI)*, sebuah seri sejarah Indonesia versi pemerintah Orde Baru yang kemudian dijadikan buku-induk bagi penulisan buku-buku teks pelajaran sejarah. Dalam proses penulisan seri 7 jilid SNI itu, Sartono Kartodirdjo, sejarawan intelektual, mengalami perbedaan pendapat dengan Nugroho Notosusanto, sejarawan militer. Sartono memiliki pendapat dalam pembangunan identitas bangsa historiografi hendaknya memiliki keseimbangan antara yang lokal dan nasional, sedangkan Nugroho lebih menonjolkan dalam sisi militer dan mewacanakan lewat berbagai saluran. Sartono kemudian keluar dari tim penulisan SNI. Namanya hanya bisa dilihat dalam SNI sampai jilid ke IV untuk edisi paling awal, yaitu terbitan hingga 1979. Pada SNI edisi kedua dan seterusnya (yaitu mulai 1982 dan seterusnya), Sartono Kartodirdjo sudah bukan lagi termasuk bagian tim.

Cara mengendalikan dan menciptakan historiografi yang tunggal baik oleh Soekarno maupun Soeharto memiliki titik tolak yang berbeda. Secara garis besar Soekarno melarang buku-buku tersebut karena aliran/ideologi/

paham kebudayaan yang diyakini penulis berbeda dengan Soekarno dan berdasarkan isi dari karya mereka. Sementara itu, Soeharto melarang karena isi buku itu sendiri, bukan berlandaskan dari ideologi dan aliran pengarang tetapi karena konten materinya bertentangan dengan apa yang oleh rezim Orde Baru dimaknai sebagai “tafsir negara”.

Hadirnya historiografi yang diproduksi oleh dominasi topangan “penguasa”, seperti dicontohkan dalam dua era baik Soekarno maupun Soeharto di atas, baik karena kebutuhan publik atas penjelasan suatu peristiwa, disebut Douglas Allchin (2004) sebagai *pseudohistory*. Sebagai contoh lain terkait *pseudohistory* adalah peristiwa 1 Oktober 1965 dan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang oleh Asvi kemudian dimasukkan dalam istilah sejarah kontroversial (lihat Asvi Marwan Adam, 2007).

Pseudohistory dalam produksi historiografi menjadi suatu persoalan historiografis. Pola-pola historiografi tunggal jika terus dipertahankan akan berakibat “menghambat” tumbuh dan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai fondasi bangsa. Apalagi diwacanakan dan dilanggengkan dalam pola-pola pendidikan.

Soeharto jeli dalam menangani keberagaman historiografi Indonesia yang seragam, mewacanakan historiografi tunggalnya lewat berbagai saluran buku pelajaran sejarah, film, dan museum (Katharine E. McGregor, 2008). Dampak dari *pseudohistory* lewat berbagai saluran utamanya lewat pendidikan amat ampuh. Dalam hal ini kita bisa mengacu pada konsep Franklin B. Weinstein (2007: 47-46) tentang apa yang disebut sebagai “Generasi 1966”. Generasi 1966 adalah mereka yang memiliki pendidikan menengah dan universitas di Indonesia sekitar 1950-1960-an. Salah satu yang menonjol dari generasi ini adalah memahami dan mendefinisikan Marxisme sebagai sesuatu yang menakutkan

dan tertanam kuat keyakinan antikomunis. Generasi 1966 kemudian menjadi objek penerima untuk melanggengkan tafsir “semu” sejarah versi Orde Baru. Generasi 1966 dan sesudahnya adalah generasi yang “tidak boleh tahu” peristiwa sejarah dalam versi lain. Mereka adalah produk dari model pendidikan “berseragam”, meminjam istilah Katharine E. McGregor (2008).

Pseudohistory yang menghasilkan tafsir tunggal dalam historiografi tidak mendidik masyarakat pada konsep-konsep disersifikasi, konsep yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk. Padahal kebenaran historiografi itu sendiri tidak tunggal, punya sisi yang tak pernah utuh dijangkau, dan tidak bersikap “toleran” terhadap alternatif kebenaran lain.

Historiografi yang *Multiple*?

Reformasi 1998 telah mengantarkan pada perayaan “kebebasan”, dibarengi dengan kemunculan beragamnya historiografi. Meskipun demikian, pelarangan dan sensor atas karya dan interpretasi barang-barang cetakan termasuk buku terus terjadi setidaknya hingga tahun 2010. Bagaimana wajah historiografi pada alam yang kian terbuka pasca Orde Baru? Menjawab pertanyaan tersebut perkembangan historiografi perempuan di Indonesia akan dilihat sebagai contoh.

Historiografi perempuan menjadi menarik dan menantang untuk dilihat karena baik pada periode Soekarno maupun Soeharto produk historiografi perempuan tidak berimbang dengan maraknya isu, perdebatan, dan wacana perempuan. Meskipun keresahan terkait kajian perempuan menjadi perhatian Presiden Soekarno kala itu. Kata Soekarno: “Soal wanita soal masyarakat. Sayang sekali, bahwa soal wanita itu belum pernah dipelajari sungguh-sungguh oleh pergerakan kita” (Soekarno, 2010: 3). Keresahan Soekarno teratasi dengan

diadakannya kursus untuk perempuan setiap dua pekan sekali di Yogyakarta pada 1946, yaitu ketika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta.

Situasi ini nampaknya terus terpelihara hingga masa pemerintahan Soeharto. Organisasi perempuan yang direduksi pada tahun 1970-an dengan berkurangnya hak-hak politik juga berpengaruh pada perkembangan studi dan wacana perempuan. Keresahan historiografi perempuan di era itu pernah diungkapkan oleh sejarawan Kuntowijoyo (2003: 120-121) bahwa belum ada yang secara khusus membahas tentang sejarah perempuan, sekalipun mulai tampak dalam beberapa tesis dan skripsi.

Persoalan budaya patriarkal nampaknya memiliki peran besar terhadap tidak berkembangnya historiografi perempuan. Namun situasi keterbukaan wacana juga memberi sumbangsih terhadap perkembangannya. Seiring dengan situasi keterbukaan wacana yang muncul di tahun 1998-an studi tentang perempuan mulai berkembang secara serius. Ada beberapa poin yang bisa dicatat atas perkembangan historiografi perempuan sejak saat itu:

Pertama, munculnya ruang yang mengkaji secara khusus tentang perempuan misalnya dengan munculnya mata kuliah sejarah perempuan/sejarawan wanita di beberapa universitas baik pada jurusan ilmu sejarah maupun pendidikan sejarah (Universitas Gadjah Mada dan Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta). Hal ini sekaligus mendukung dan memberi ruang dalam penelitian S-1 dan S-2 bertemakan perempuan dengan berbagai perspektifnya. Sebagai salah satu contoh adalah disertasi karya Mutiah Amini berjudul *Moderitas dan Perubahan Identitas di Perkotaan: Sejarah Sosial Keluarga Elite Jawa di Semarang Pada Abad ke XX* (Disertasi Universitas Gadjah Mada 2013), Anna Mariana *Politik (Seksual) Atas Tubuh Perempuan: Sejarah Perbudakan*

Seksual Pada Masa Fasisme Jepang dan Neo-Fasisme Orde Baru di Indonesia, Sebuah Perbandingan (Tesis, Universitas Gadjah Mada 2011), Syarifah Aini *Surat Kabar Soenting Melajoe dan Wacana Nasionalisme* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2018), dan lain-lain.

Kedua, semakin beragamnya berbagai pendekatan dalam historiografi perempuan. Pendekatan historiografi perempuan tidak melulu mengenakan pendekatan politik (termasuk organisasi perempuan dan perannya dalam melawan penjajah di dalamnya), tetapi sudah mencakup hampir semua sisi seperti budaya, sosial ekonomi, politik, gender, dan lainnya.

Hal ini semakin didukung dengan berkembang dan terbukanya wacana perempuan sebagai pendekatan dengan munculnya kajian serius dalam publikasi tentang perempuan seperti munculnya *Jurnal Perempuan* (awal terbit 1994 lebih dikenal sebagai organisasi 1998 karena beberapa anggotanya ditangkap dalam demonstrasi Suara Ibu Peduli, untuk membuka keberanian perempuan di ruang politik) (Rhoma Dwi Aria dan Hajar N.S, editor, 2008: 288-289). Selain itu, muncul *Jurnal Pemberdayaan Perempuan* pada tahun 2001 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (Rhoma Dwi Aria dan Hajar N.S, editor, 2008: 329).

Tanpa mengesampingkan karya lain, dalam hal pendekatan tulisan Barbara Watson Andaya (1995), *Women and Economic Change: The Papper Trade Pre-Modern Southeast Asia* dapat digunakan sebagai contoh. Karya ini menggambarkan perempuan Sumatera di era kolonial dengan menyuguhkan tentang posisi ekonomis perempuan-perempuan Indonesia. Karya Barbara Watson Andaya itu, antara lain, dimaknai oleh Anthony Reid (2011: 167-176) dengan pernyataan bahwa perempuan di Asia Tenggara, Nusantara khususnya, memiliki posisi dan daya tawar yang tinggi. Posisi tawar itu tergambar

misalnya dalam profil perempuan Sumatera (dalam studi Barbara Andaya) yang mampu “menggagalkan” kebijakan kolonial Inggris, yang pada akhirnya merusak sistem produksi. Andaya berhasil menyuguhkan pola perlawanan perempuan dengan kegiatan ekonomisnya sekaligus menunjukkan bahwa budaya lokal yang tidak tersentuh dengan adanya kolonial dengan peran perempuan yang kuat.

Ketiga, muncul historiografi perempuan dengan interpretasi sejarah yang “menggugat”, “menyajikan data-data baru”, dan “memberi tafsir lain dari narasi besar/*grand narrative*. Henk Nordholt dan Bambang Purwanto menyebutnya sebagai *narasi alternatif*. Tulisan-tulisan ini muncul memberi ruang untuk merenungkan kembali tentang ingatan kolektif yang sudah ditanamkan tentang “penjahat” atau musuh dalam perspektif penguasa.

Tulisan Saskia Eleonora Wieringa (1999) *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia* menggunakan pendekatan gender. Saskia menyajikan tafsir dengan data baru bahwa Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang digambarkan terlibat dalam peristiwa pembunuhan jenderal di Lubang Buaya dengan cara keji, tidak terbukti (1999: 498-499). Sementara di sisi lain, pemerintah Soeharto melalui surat kabar *Berita Yudha* misalnya, koran propaganda, mengemas sedemikian rupa berita-berita kekejaman terkait peristiwa G30S dan PKI, seperti “Wanita sedang hamil tiga bulan (anggota Gerwani) dilatih Bunuh Orang” (Agung Dwi Hartanto, 2007: 818-819). Gerwani digambarkan sebagai gerakan yang kejam dan bengis. Maka, meminjam istilah Saskia, tafsir negara terhadap Gerwani adalah penghancuran gerakan perempuan Indonesia.

Karya serupa lainnya adalah tulisan Reni Nuryati (2011), *Perempuan Berselimut Konflik*. Reni menggunakan pendekatan feminis menggambarkan tentang perempuan Minangkabau

di Masa Dewan Banteng dan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Dengan mengandalkan data wawancara Reni memperkaya dan memberikan data baru tentang pengalaman-pengalaman perempuan Minangkabau yang sebagai korban perang mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang selama ini bungkam karena dikaitkan dengan isu komunisme.

Keempat, munculnya kajian tentang tokoh-tokoh alternatif perempuan di luar “kelompok perempuan” yang telah menjadi bagian inti narasi besar negara. Misalnya, nama-nama tokoh perempuan Siti Soendari, Siti Rukiah, Rubinem, dan lain-lain. Tokoh Siti Rukiah seorang sastrawan yang pernah bergabung dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang dalam interpretasi pemerintah Soeharto disamakan dengan keanggotaan dalam Partai Komunis Indonesia. Kehidupan Rukiah pascaperistiwa 1 Oktober 1965 sangat tidak beruntung. Ia pernah dipenjara tanpa proses pengadilan dan setelahnya harus membesarkan tujuh anaknya sendirian (Yerry Wirawan, 2018). Dengan pendekatan sastra dalam bingkai gender dan politik, Yerry Irawan membaca ulang karya Siti Rukiah *Kedjatuhan Hati* untuk melihat situsi historis revolusi yang kompleks di Purwakarta.

Meskipun telah terbuka dan berkembang, historiografi perempuan masih menunjukkan banyak ruang kosong yang harus diisi. Banyak tema perempuan yang belum tergarap secara serius. Sebagai contoh tema buruh perempuan, yang antara lain baru ditulis dalam sub-bab beberapa penelitian, seperti dalam karya Reggie Bay *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda* (2009, 140-142). Tema perempuan dan sehari-hari hendaknya juga menjadi perhatian. Sekali lagi sejarah adalah milik seluruh masyarakat bukan dominasi orang-orang tertentu. Namun sayangnya, penulisan sejarah Indonesia secara umum masih mewarisi model sejarah kolonial, yaitu

sejarah orang-orang besar dan sejarah peristiwa-peristiwa besar, utamanya peristiwa politik dan militer.

Penulisan sejarah perempuan sehari-hari salah satunya bisa merujuk sumber otobiografi. Tradisi tulisan seperti ini sudah dilakukan sejak masa kolonial. Karya Raden Ajeng Kartini *Habis Gelap terbitlah Terang* dan karya Suwarsi Djojopuspito *Manusia Bebas*, misalnya, dapat dipakai sebagai sumber untuk dikaji dalam penulisan sejarah perempuan. Tulisan-tulisan otobiografi lain masih dapat ditemukan. Misalnya karya Irawati Durban Ardjo *Tari Sunda Baru untuk Panggung Baru* (2011) berkisah tentang pengalamannya dalam menari dan melakukan perjalanan ke luar negeri di era 1950-1965. Atau karya lain berjudul *Goesti Noeroel: Mengejar Kebahagiaan* (Ully Hermono: 2017), *Saya Farida* (Farida Oetoyo: 2014) dan lain-lain.

Penutup

Dampak psikologis terhadap produk historiografi yang tunggal yang diwartakan lewat berbagai saluran masih dapat dirasakan sampai saat ini. Reproduksi yang terus-menerus melahirkan masyarakat yang “takut”. Masyarakat yang takut untuk memahami bahwa narasi sejarah tidak hanya memiliki satu kebenaran melainkan berbagai versi bergantung pada perspektif, sudut pandang, dan berbagai kepentingan. Kebiasaan dalam memahami narasi tunggal historiografi telah berkontribusi dalam membentuk masyarakat menjadi tidak toleran terhadap kebenaran lain. Celakanya, *pseudohistory* yang disajikan dalam berbagai saluran juga membentuk sikap yang kurang kritis terhadap berbagai narasi yang hadir. Kita tidak terbiasa untuk mengonfirmasi sebuah data dalam historiografi.

Lantas perkembangan keilmuan dan historiografi juga tidak serta merta mengubah pola yang sudah tertanam dalam masyarakat. Dalam bidang pendidikan tingkat sekolah pertama dan atas (SMP dan SMA), misalnya, narasi sejarah tidak berimbang terhadap perkembangan keilmuan. Meski perkembangan historiografi perempuan nampak menggembirakan, masih banyak ruang-ruang yang masih harus terus diisi. Semoga semakin beragamnya historiografi menjadikan kita manusia yang makin toleran. •

Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Marwan. *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Aini, Syarifah. 2018. “Surat Kabar Soenting Melajoe dan Wacana Nasionalisme”, Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.
- Amini, Mutiah. 2013. “Modernitas dan Perubahan Identitas di Perkotaan: Sejarah Sosial Keluarga Elite Jawa di Semarang pada Abad XX”, Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- Andaya, Barbara Watson. “Women and Economic Change: The Pepper Trade in Pre-Modern Southeast Asia”, *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 38(2) (1995).
- Aria, Rhoma Dwi dan Hajar N.S (ed.). 2008. *Seabad Pers Perempuan: Bahasa Ibu, Bahasa Bangsa*. Yogyakarta: I-Boekoe.
- Baay, Reggie. 2009. *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Bourchier, David. 2014. *Ilberral Democracy in Indonesia; The Ideology of the Family State*. London and New York: Routledge.
- Djojopuspito, Soewarsih. *Manusia Bebas*. Jakarta: Djambatan.
- Douglas, Allchin. “Pseudohistory and Pseudoscience”, *Science & Education* 13(3) (2004), 179-195
- Ethan, Mark. “Asia’s Transwar Lineage: Nationalism, Marxism, and ‘Greater Asia’ in an Indonesian Inflection”, *The Journal of Asian Studies*, 65(3) (Aug 2006).
- Harian Rakjat, “Daftar Buku2 Jang Dilarang Disekolah Negeri dan Swasta”, 12 September 1965.
- Hartanto, Agung Dwi. 2007. *Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, Tanah Air Bahasa*. Yogyakarta: Indonesia Buku.
- Hermono, Ully. Gusti Noeroel: Mengejar Kebahagiaan. Jakarta: Kompas.
- Herlambang, Wijaya. 2013. *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Melegitimasi Anti-Komunis Melalui Sastra dan Film* (Yogyakarta: Marjin Kiri)
- Hong Liu. 2006. “The Transnational Construction of ‘National Allegory’: China and the Cultural Politics of Postcolonial Indonesia”, *Critical Asian Studies*, 38(3).
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacanal.
- Lindsay, Jennifer dan Maya Liem (edt). 2012. *Heirs to World Culture: Being Indonesian, 1950-1965*. Leiden: KITLV.
- Mariana, Anna. 2011. “Politik (Seksual) Atas Tubuh Perempuan: Sejarah Perbudakan Seksual pada Masa Fasisme Jepang dan Neo-Fasisme Orde Baru di Indonesia, Sebuah Perbandingan”, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

- McGregor, Katharine E. 2008. *Ketika Sejarah Berseragam; Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Nordholt, Henk Schulte, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari. 2013. "Memikir Ulang Sejarah Indonesia", dalam *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV Jakarta, dan Pustaka Larasan.
- Nuryati, Reni. 2011. *Perempuan Berselimut Konflik*. Yogyakarta: Ombak.
- Oetoyo, Farida. 2014. *Saya Farida*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Reid, Antony. 2011. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680: Jilid 1 Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Obor.
- Soekarno. 2001. *Sarinah*. Jakarta: Gunung Sahari.
- Weinstein, Franklin B. 2007. *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Soekarno to Soeharto*. United States: Equinox Publishing.
- Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.
- Wirawan, Yerry. "Independent Woman in Postcolonial Indonesia: Re-reading the Works of Rukiah", *Southeast Asian Studies*, 7(1) (April 2018).